

BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Triple bottom line*

Triple bottom line (TBL) yaitu suatu pendekatan yang diperkenalkan oleh John Elkington, yang membahas suatu usaha tidak hanya melihat dari keuntungan saja tetapi melihat dari 3 aspek yaitu yang pertama adalah (*profit*) mempertimbangkan keuntungan dalam usaha, aspek sosial (*people*) dalam bentuk kesejahteraan pekerja dan lingkungan (*planet*) menjaga lingkungan.¹ Dalam pendekatan *triple bottom line* ini suatu keberlanjutan usaha hanya dapat dicapai apabila ketiga pilar tersebut dilaksanakan dan diterapkan oleh pemilik usaha. Yang dijalankan dengan seimbang dan terintegrasi dengan baik. Menurut Elkington ketiga aspek *TBL* dijelaskan sebagai berikut:

1. Aspek *profit* (ekonomi)

Pada aspek *profit* ini suatu usaha ini menjalankan usaha dengan melihat keuntungan yang mana dapat menghasilkan keuntungan serta bisa berjalan dengan baik kedepannya dengan meminimalkan kerugian pada usaha, *Profit* dalam *tripel bottom line* ini melibatkan penciptaan nilai ekonomi yang berkelanjutan, baik untuk dijalankan dalam jangka panjang yang biasanya di terapkan dan digunakan oleh perusahaan maupun untuk

¹ Yusuf Deni Kristanto, *Etika Bisnis*.

pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan harus tetap berorientasi dalam mencari keuntungan yang ekonomis yang mana bisa untuk terus beroperasi dan berkembang dalam kedepannya. Aspek *profit* Perlu ditekankan kembali bahwa *profit* bagi perusahaan tidak hanya pendapatan usaha, namun lebih luas lagi yaitu *profit* dari dampak aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Keuntungan aspek ini mencakup pada efisiensi bisnis, serta keuntungan finansial, pertumbuhan sebuah ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja.²

2. Aspek *People* (Sosial)

Pada aspek *people* ini menekankan pada pentingnya tanggung jawab sosial yang harus dilakukan oleh pelaku usaha tersebut kepada masyarakat, baik di dalam usaha maupun diluar seperti masyarakat sekitar. Pelaku usaha diharapkan untuk memperhatikan lagi dalam kesejahteraan karyawan, memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar, dan menjamin keadilan sosial, pada kondisi kerja yang baik, aspek *people* ini ditekankan pelaku usaha ini harus menciptakan sumber daya manusia dengan sangat baik, yang mana mencakup pemenuhan hak-hak para karyawan, seperti penyediaan fasilitas yang layak, lingkungan pengaturan jam kerja yang wajar, menghindari praktik eksploitasi terhadap karyawan dan pekerja di bawah umur, kesehatan

² Cicik Harini and Vidiyanna Rizal Putri, *Manajemen Bisnis*.

karyawan, serta kontribusi kepada masyarakat lokal dalam bentuk *suplay*.

3. Aspek Planet (Lingkungan)

Aspek *planet* dan lingkungan merupakan aspek yang sangat terkait dengan manusia dalam kehidupannya. Keuntungan menjadi fokus utama dalam dunia bisnis sehingga pelaku usaha selalu lalai dalam hal lingkungan sekitar dan tanpa berupaya menjaga lingkungan. Hal ini apabila dibiarkan akan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Penerapan pada prinsip aspek lingkungan ini pelaku usaha harus bertanggung jawab dalam hal seperti menyebabkan polusi, pencemaran air, dan perubahan iklim. Dalam kegiatan usaha menjaga keberlanjutan lingkungan, pelaku bisnis bisa mengurangi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan. Dengan menjaga lingkungan, perusahaan bisa meraih keuntungan yang lebih besar, terutama dari segi kesehatan, kenyamanan, serta ketersediaan sumber daya yang lebih terjamin keberlangsungannya dengan pelestarian sumber daya alam, pengelolaan limbah, penggunaan energi ramah lingkungan, dan pengurangan dampak ekologis.³

Menurut Timothy F sebagai Pusat Penelitian Bisnis Indiana pada artikel nya yang berjudul *Konsep triple bottom line: Apa Itu dan Bagaimana Cara Kerjanya*, mengatakan *triple*

³Trias Palupi Kurnianingrum, '*Bagian I (Studi Kasus Pt . Newmont Nusa Tenggara*', pp. 1-160.

bottom line adalah kerangka akuntansi yang menggabungkan tiga dimensi kinerja: sosial, lingkungan, dan keuangan. Ini berbeda dari kerangka pelaporan tradisional karena mencakup ukuran ekologis (atau lingkungan) dan sosial yang mungkin sulit untuk diberi ukuran yang tepat.⁴ Dimensi TBL juga biasa disebut tiga P: *people* (orang), *planet* (*planet*), dan *profits* (keuntungan) Sebagai pengukur kinerja, konsep TBL seringkali dibagi ke dalam dua bagian besar, yaitu keuangan dan sosial. Menurut felisia dalam artikel *triple bottom line dan sustainability* tahun 2014 mengatakan *triple bottom line* dapat disimpulkan sebagai tiga pilar dalam pengukuran kinerja, yaitu dari sisi ekonomi atau keuangan, sosial, dan lingkungan.⁵ Pada aspek *profit*, pelaksanaan TBL mendukung untuk para pelaku industri mikro dalam mempertahankan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang kedepannya dengan melalui efisiensi dalam biaya, pemanfaatan sumber daya yang lebih bijaksana, Dari sisi *people*, bisnis mikro sering kali bersifat keluarga atau berbasis komunitas, sehingga berkontribusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat kesejahteraan sosial.⁶

⁴ Timothy F. Slaper, 'The Triple Bottom Line : What Is It and How Does It Work ?', pp. 4–8.

⁵ felisia, 'Triple Bottom Line Dan Sustainability', 18 (2014), pp. 14–27.

⁶ Mahbub Safril, 'Pengaruh Orientasi Profit, People, Planet Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha : Studi Pada Pengrajin Tahu Di Desa Kalisari Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas', 2025.

Sedangkan dari sisi *planet*, bisnis mikro seperti usaha makanan, kerajinan tangan, dan produksi rumahan sering kali menghasilkan limbah atau memanfaatkan bahan baku tertentu, sehingga penerapan praktik yang lebih ramah lingkungan seperti pengelolaan limbah, pengurangan penggunaan plastik, dan pemanfaatan bahan lokal sangat penting untuk meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem. Dengan demikian, penerapan *triple bottom line* di sektor industri mikro tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen dan peluang akses pembiayaan, tetapi juga memperkuat ketahanan bisnis serta mendukung prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Triple bottom line menuntut para pelaku usaha untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi dalam operasional bisnisnya agar menciptakan keberlanjutan jangka panjang⁷. Pada aspek *profit*, perusahaan tetap memperoleh pendapatan yang stabil dan tumbuh. Namun, keuntungan yang dicapai harus melalui proses yang adil dan tidak merugikan pihak lain. Dimensi *people* mencakup hal hal seperti pemberdayaan masyarakat, pelatihan, hubungan kerja yang adil, serta dampak terhadap pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan dimensi *planet* berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, termasuk pengelolaan limbah, penggunaan energi, pemakaian sumber daya alam secara

⁷ Eka Johni Putra, Jacy Tubalawony, and Eva Desembrianita, *Manajemen Pemasaran Berkelanjutan : Teori Dan Praktik*, 2024.

efisien, dan pengurangan emisi karbon.⁸ Konsep *TBL* menempatkan keberlanjutan sebagai pusat suatu strategi bisnis. Perusahaan yang berhasil mengintegrasikan ketiga dimensi ini akan memiliki keunggulan kompetitif dalam jangka panjang dan menjadi lebih adaptif terhadap perubahan global, termasuk isu lingkungan dan sosial.⁹

B. Bisnis Berkelanjutan (*Sustainability*)

Usaha berkelanjutan adalah suatu pendekatan bisnis yang mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks ekonomi, konsep keberlanjutan ini menjadi sangat penting mengingat terdapat tekanan global terhadap sumber daya alam yang semakin dikit atau menipis, perubahan iklim, serta meningkatnya kesenjangan sosial.¹⁰ Bisnis yang berkelanjutan merupakan pendekatan operasional yang menggabungkan efisiensi penggunaan energi, mengurangi emisi, pengelolaan sisa, dan

⁸Ahmad Zulfikar and Ersi Sisdianto, '*Strategi Csr Berkelanjutan : Membangun Harmoni Antara Profit , People , Dan Planet*', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 2.1 (2025), pp. 22–31 <<https://doi.org/10.61722/jemba.v2i1.554>>.

⁹Gita Sartika, '*Peran Strategis Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Kesuksesan Organisasi*', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4.1 (2024), pp. 177–88.

¹⁰Dwi Novaria and others, *Manajemen Berkelanjutan Perspektif Sosial*, 2024 <www.sulur.co.id>.

pendekatan yang bersahabat dengan lingkungan dalam kerangka model usaha kontemporer.¹¹

Oleh karena itu, usaha tidak lagi hanya dipandang dari seberapa besar keuntungan yang dihasilkan, tetapi juga seberapa besar dampaknya terhadap keberlanjutan kehidupan manusia dan lingkungan di masa depan. Menurut *Brundtland Commission* bisnis yang berkelanjutan dapat diartikan sebagai "*development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.*" Dalam kegiatan usaha, hal ini diterjemahkan sebagai tanggung jawab perusahaan dalam menjaga keberlangsungan sumber daya dan ekosistem agar generasi mendatang tetap memiliki kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhannya.¹² Untuk mewujudkan usaha berkelanjutan, perlu memperhatikan beberapa indikator penting, antara lain: Efisiensi penggunaan energi dan sumber daya (air, listrik, bahan baku) Pengelolaan limbah usaha secara bertanggung jawab Pemberdayaan masyarakat sekitar dan penciptaan nilai sosial Komitmen terhadap kesejahteraan karyawan dan etika bisnis transparansi dalam pengelolaan

¹¹ Eko Rian Dalu and others, 'Sustainability Dan Green Business : Implementasi Praktik Usaha Ramah Lingkungan Sebagai Respons Terhadap Krisis Iklim Global Sustainability And Green Business : Implementing Environmentally Friendly Business Practices In Response To The Global Climate Crisis', November, 2025, pp. 17948–59.

¹² Savitri Nur Setyorini, 'Penerapan Transshipment: Kaitannya Dengan Hak Bangsa Indonesia Atas Komoditas Perikanan Dan Pembangunan Berkelanjutan', *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 1.2 (2014), pp. 86–100, doi:10.38011/jhli.v1i2.16.

keuangan dan pelaporan usaha dalam praktiknya, usaha berkelanjutan membutuhkan kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, konsumen, dan masyarakat luas.¹³

Prinsip-prinsip usaha yang berkelanjutan adalah dasar yang dipakai oleh pelaku usaha untuk meraih tujuan keberlanjutan. Ada beberapa prinsip utama yang menjadi dasar praktik bisnis yang berkelanjutan. Pertama, prinsip keberlanjutan ekonomi yang mana menekankan pada pentingnya menjaga stabilitas keuangan serta memastikan pertumbuhan yang terus-menerus tanpa merugikan aset-aset penting perusahaan. Dalam konteks usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), prinsip ini meliputi efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan menggunakan secara bijak dan sebutuhnya saja. Kedua, keberlanjutan sosial merujuk pada tanggung jawab usaha untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Prinsip ini mencakup peningkatan kesejahteraan pekerja, keterlibatan dengan masyarakat sekitar, serta terciptanya lingkungan kerja yang inklusif dan adil.

Ketiga, keberlanjutan lingkungan adalah prinsip yang menekankan pada pengelolaan dampak dari aktivitas bisnis terhadap ekosistem alami. Ini meliputi pengurangan emisi karbon, peningkatan efisiensi energi, manajemen limbah, serta

¹³Herlina Ilyas and others, 'Green UMKM: Transformasi Bisnis Dalam Upaya Menjaga Kelestarian Lingkungan', *Owner*, 9.1 (2025), pp. 200–212, doi:10.33395/owner.v9i1.2517.

penggunaan material yang ramah lingkungan. Usaha mikro, kecil, dan menengah yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan sering kali menerapkan praktik daur ulang, memanfaatkan energi terbarukan, serta mengurangi jejak karbon dalam proses produksinya. Keempat, prinsip ini mencakup penerapan inovasi untuk menciptakan produk, layanan, atau proses yang mendukung keberlanjutan. Inovasi berkelanjutan dalam UMKM dapat melibatkan penerapan teknologi ramah lingkungan, pemanfaatan bahan daur ulang, dan pengembangan produk yang dirancang untuk meminimalkan dampak pada lingkungan. Prinsip-prinsip ini memberikan panduan bagi pelaku UMKM untuk mengintegrasikan konsep keberlanjutan dalam praktik bisnis mereka, meskipun sering dihadapkan pada tantangan keterbatasan sumber daya. Penerapan prinsip ini dapat dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan prioritas dan kebutuhan masing-masing bisnis.¹⁴

Bisnis berkelanjutan merupakan suatu pendekatan usaha yang menyatukan unsur ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam operasional bisnis untuk memastikan kelangsungan dalam usaha jangka panjang. Pendekatan ini menekankan bahwa usaha seharusnya tidak hanya fokus pada *profit* ekonomi, tetapi juga memperhatikan penyebabnya terhadap masyarakat serta perlindungan lingkungan. Dalam dunia usaha mikro, penerapan

¹⁴Eman Diantoro and Bambang Arianto, 'Studi Fenomenologi Konsep Bisnis Berkelanjutan Dalam Konteks Pegiat UMKM', 1.02 (2024), pp. 127–44.

konsep bisnis berkelanjutan sangat krusial karena UMKM memainkan peran signifikan dalam ekonomi dan berkontribusi pada penciptaan kerja.

Oleh karena itu, usaha mikro harus menerapkan strategi yang bisa menjaga keberlangsungan bisnis melalui inovasi produk, efisiensi dalam menggunakan sumber daya, serta pengelolaan usaha yang memperhatikan aspek lingkungan.¹⁵ Penerapan pada prinsip bisnis berkelanjutan juga berkaitan dengan kemajuan ekonomi yang ramah lingkungan atau bisnis hijau dalam usaha mikro. Aktivitas bisnis yang memperhatikan lingkungan mendorong pelaku usaha untuk lebih peduli terhadap pemakaian bahan baku, pengelolaan sampah, dan efisiensi energi agar operasional usaha tidak merusak ekosistem. Ini dapat membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkesinambungan serta meningkatkan performa usaha mikro dalam jangka waktu yang panjang.¹⁶

C. Ekonomi Islam dan *Maqashid Syariah*

Ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi yang berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadis. Tujuannya untuk mengelola suatu aktivitas ekonomi manusia sehingga berjalan dengan adil.

¹⁵ Abdur Rohman Hersiyah1, '*integrasi aspek lingkungan dalam penentuan*', 3.1 (2025), Pp. 37–48.

¹⁶ vely randyantini and others, '*penyuluhan model bisnis hijau umkm dalam mendorong*', 2.2 (2024), Pp. 361–67.

aktivitas ekonomi tidak hanya fokus pada keuntungan saja yang mana harus juga memperhatikan nilai-nilai moral, dan tanggung jawab sosial.¹⁷ Menurut Imam Al-Ghazali, *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan syariat yang berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Menurutnya, seluruh ketentuan syariat pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kelima unsur tersebut karena menjadi fondasi utama kehidupan manusia.

Menurut M.Umer Chapra, ekonomi Islam ialah ilmu yang mempelajari bagaimana cara dalam mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang sesuai dengan Islam tanpa membatasi kebebasan individu secara berlebihan serta tetap menjaga keseimbangan sosial dan moral. Konsep ini menekankan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan nilai keadilan, kesejahteraan sosial, serta keberkahan dalam kehidupan¹⁸ Dalam ekonomi Islam, bisnis tidak hanya dilihat dari aspek keuntungan material, tetapi juga diposisikan sebagai sarana ibadah dan kemaslahatan umat. Nilai-nilai yang mengandung seperti keadilan (*'adl*), keseimbangan

¹⁷ Prinsip Hukum, Ekonomi Islam, And Ekonomi Islam, '*Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam* ', 21.April (2024), Pp. 71–81.

¹⁸ Mohammad Zaki Su And Others, '*Pemikiran M. Umer Chapra Tentang Masa Depan Ekonomi Islam*', 156, Pp. 1–19.

(*tawazun*), tanggung jawab (*amanah*), dan larangan terhadap kerusakan (*fasad*) menjadi prinsip utama dalam kegiatan ekonomi.¹⁹

Islam sejak awal telah mengenal konsep keberlanjutan yang dikenal melalui *maqashid syariah*, yakni tujuan-tujuan utama syariat Islam yang meliputi: *Hifdz al-din* (menjaga agama), *Hifdz al-nafs* (menjaga jiwa), *Hifdz al-'aql* (menjaga akal), *Hifdz al-nasl* (menjaga keturunan), *Hifdz al-mal* (menjaga harta) setiap pelaku usaha harus tercapainya *maqashid* ini. Contohnya adalah penggunaan teknologi yang membuat bahaya jiwa dan akal (tidak adiktif atau merusak mental), sistem pembiayaan dan transaksi yang menjaga harta serta mendukung distribusi pendapatan yang adil kepada masyarakat.²⁰ Berdasarkan Al-Syatibi memaparkan bahwa seluruh ketetapan hukum terdiri dari lima bagian utama yang dikenal dengan *daruriyat* dalam rangka membentuk hukum yang ditekan dapat dipertahankan. Menjaga agama atau *hifzh al-din*, menjaga kejiwaan atau *hifzh al-nafs*, menjaga akal atau *hifzh al-aql*, menjaga turunan atau *hifzh al-nasl* serta menjaga harta atau *hifzh al-mal* adalah semua contoh dari *hifzh al-mal*.²¹

¹⁹ Marcos Moshinsky, 'Etika Bisnis Islam Dalam Pemasaran', *Nucl. Phys.*, 13.1 (2021), pp. 104–16.

²⁰ Kemala Ayu and Nanda Suryadi, 'Filsafat Distribusi Dalam Ekonomi Islam : Tjauan Normatif', 9 (2025 –6).

²¹ Jurnal Neraca and others, 'Konsep Integrasi Green Accounting Dan Maqashid Syariah: Paradigma Akuntansi Untuk Keberlanjutan Dan Kemaslahatan', 10 (2026), pp. 18–31, doi:10.31851/neraca.v10i1.21186.

1. Masalah *Daruriyat*

Kategori *daruriyat* yaitu memperoleh kepentingan penjagaan antara lain agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), harta (*al-mal*) dan keturunan (*al-nasl*).

Kebutuhan dasar *daruriyat* ini kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh semua manusia. Kebutuhan ini mencakup lima elemen pokok kehidupan manusia (jiwa, agama, ilmu, harta dan keturunan), demi kelangsungan hidupnya. Sebab didalam kebutuhan ini mengandung (kesejahteraan akhirat). *Daruriyat* adalah tujuan utama dalam kehidupan manusia.

a. Memelihara Agama.

Adalah salah satu bagian dari kebutuhan mendasar kepada manusia yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kedamaian dalam kehidupan. Menjaga agama adalah kebutuhan terpenting dalam hidup manusia. Agama dapat membawa kesejahteraan untuk manusia. Penjagaan terhadap agama dapat dilakukan dengan beriman kepada Allah, berpegang teguh terhadap agama, termasuk menghindari riba dalam mencari modal kerja.²²

Agama keperluan penting dan utama bagi manusia, maka penting dalam menjaga kelestarian dan kemaslahatannya. Cara memelihara agama yaitu dengan

²² Analisis Securities, Crowdfunding Syariah, and Sebagai Alternatif, 'Mumtaz : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam', 2 (2023), pp. 100–109.

menunaikan syariat sesuai akidah. Pemeliharaan agama diwujudkan dengan menjalankan usaha sesuai prinsip syariah. Pelaku usaha harus memastikan bahwa produk yang dijual halal dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.²³

b. Memeliharaan Jiwa

Eksistensinya seorang manusia serta mewujudkan keamanan dan ketentraman hidup. Pemeliharaan jiwa dalam sektor UMKM berhubungan dengan perlindungan terhadap kehidupan individu.²⁴

c. Memeliharaan Akal

Adalah salah satu elemen penting yang ada pada diri manusia. Dengan akal seseorang dapat berpikir dan memiliki pengetahuan. Akal yang dimaksud al Ghazali merupakan suatu ilmu dari segala keadaan yang ada. Maka dengan akal seseorang dapat mengambil keputusan yang akan memberikan manfaat bagi hidupnya. Akal atau ilmu pengetahuan adalah salah satu elemen dasar manusia yang harus dijaga. Ilmu memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia.²⁵ Tidak memproduksi atau memperdagangkan barang-barang yang bisa merusak akal

²³Andi Muhammad Asbar, 'Al-Sittah Sebagai Dasar Normatif Pendidikan Islam', 1.1 (2022).

²⁴ Menurut Hasan Langgulung, *Imam Al-Ghazali Dan Filsafat Jiwa*.

²⁵Ricky Zulfa Fauzi, Reza Amri, And Hakim Shalahudin, 'korelasi akal dan jiwa dalam perspektif Al-Ghazali', 1.1 (2024).

seperti alkohol dan obat-obatan terlarang. Di samping itu, pelaku bisnis juga harus meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, agar dapat mendorong inovasi dan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.²⁶

d. Memelihara Harta

Harta adalah hal yang sangat dibutuhkan dalam keperluan hidup manusia. Islam mengajarkan bagaimana cara yang baik dan benar untuk pencarian dan pengelolaan harta.²⁷ Oleh karena itu dalam upaya pencarian harta dilarang melakukan suatu tindakan-tindakan yang menyimpang diantaranya mencuri, korupsi, boros, dan hal-hal yang mengandung unsur tidak sesuai syariah.²⁸ Sebagaimana dalam QS. An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka

²⁶Hierarki And Abraham Maslow, 'Pasangan Long Distance Marriage Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam Dan Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow', 2024.

²⁷Eka Febrianti, 'Konsep Pemeliharaan Harta Dalam Perspektif Konvensional Dan Syariah', 3 (2023).

²⁸Antara Hukum and others, 'Etika Bisnis Islami Dalam Perspektif Fiqih Muamalah', 2025.

*sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*²⁹

Berlandaskan pada surah An-Nisa ayat 29, para pelaku usaha dapat memperoleh pemahaman etis dalam mengelola bisnis yang sangat menekankan pada empat aspek, yakni: meluruskan persepsi tentang harta, tidak melakukan kebatilan, mencapai kerelaan, dan tidak melakukan kezaliman. Melalui keempat poin tersebut, para pelaku usaha mempunyai paradigma yang kokoh dalam berbisnis dan dapat bersaing secara sehat serta tidak merugikan pihak lainnya.³⁰ Demikian, aset bukan hanya memberikan manfaat bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.³¹

2. Masalahah *Hajiyat*

Masalahah *Hajiyat* yang bermakna kebutuhan yang bersifat mendesak, fundamental, dan wajib dipenuhi. Asy Syatibi berpendapat mengenai hal ini bahwa hal-hal yang termasuk dalam kategori *daruriyat* mencakup penjagaan antara lain agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), harta (*al-mal*) dan keturunan (*al-nasl*).

²⁹ 'NU, ONLINE' <<https://quran.nu.or.id/an-nisa/29>>.

³⁰ Abul Mawahib R, 'Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis Berdasarkan Surah', 2.2 (2024), Pp. 45–59.

³¹ Iain Palangka Raya and others, 'Peran Manajemen Keuangan Dalam Pengelolaan Umkm Untuk Meningkatkan Keberlanjutan Bisnis', 3 (2025), pp. 18–41.

Hajiyat di artikan sebagai kebutuhan. Jika kebutuhan *hajiyat* terpenuhi maka mampu mencegah terjadinya kesulitan dalam mencapai keperluan *dauriyat*, tetapi apabila keperluan *hajiyat* tidak terpenuhi maka tidak merusak keberadaan kebutuhan *daruriyat*. Masalah *hajiyat* adalah kebutuhan sekunder yang bertujuan untuk mempermudah kehidupan manusia. Pada ranah UMKM, kebutuhan ini tidak dikategorikan sebagai kewajiban, namun ketidakadaan pemenuhan kebutuhan ini dapat menyebabkan kesulitan dalam operasional usaha. Salah satu contoh penerapan masalah *hajiyat* dalam UMKM adalah pemanfaatan teknologi digital seperti platform *e-commerce* dan layanan pengantaran untuk memperluas jangkauan pasar.³² Selain itu, pemakaian alat produksi yang lebih canggih juga berpotensi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Akses terhadap pembiayaan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah juga termasuk dalam kategori ini, karena dapat mendukung pengembangan usaha. Dengan pemenuhan kebutuhan *hajiyat*, pelaku UMKM dapat mengelola usaha mereka dengan cara yang lebih efektif dan efisien.

3. Masalah *Tahsiniyat*

Tahsiniyat ini memiliki definisi yaitu hal-hal penyempurnaan. Dalam hal *tahsiniyat* merupakan penyempurnaan kebutuhan untuk *dauriyat* dan *hajiyat*. Maka dari itu keperluan

³²Elvira Khairunnisa Ibrahim, 'Analisis Konsep Masalah Sebagai Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam', 7.2 (2025), pp. 1–19.

ini sering diartikan kebutuhan tersier. Masalah *tahsiniyat* merupakan kebutuhan tersier yang berfungsi sebagai pelengkap dan penyempurna. Dalam UMKM, aspek ini berkaitan dengan nilai estetika, etika, dan kenyamanan.³³

Penerapan *tahsiniyat* dapat dilihat dari penggunaan kemasan produk yang menarik, pelayanan yang ramah kepada pelanggan, serta penataan tempat usaha yang bersih dan rapi. Selain itu, etika bisnis seperti sopan santun dan keramahan juga termasuk dalam kategori ini. Meskipun tidak bersifat wajib, pemenuhan aspek *tahsiniyat* dapat meningkatkan daya saing usaha dan memberikan nilai tambah bagi konsumen.³⁴

Pengertian *maqashid syariah* adalah maksud atau tujuan utama dari penetapan hukum Islam yang bertujuan untuk menciptakan kebaikan bagi manusia serta menghindari kerugian dalam hidup. Ide ini menegaskan bahwa setiap peraturan yang ditetapkan dalam syariat Islam punya tujuan untuk melindungi kepentingan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dalam ajaran Islam, suatu usaha bukan hanya menjadi persoalan ekonomi atau lingkungan, tetapi juga merupakan bagian dari

³³Konsep Dan And Others, 'At-Tarbiyah238 Jurnal Penelitian dan Pendidikan Agama Islam Vol. 3 Nomor 2, April 2026 Konsep Dan Implementasi Maqasid Syari'Ah (Daruriyyat, Hajiyyat, Dan Tahsiniyyat) Dalam Hukum Islam', 3.April (2026), Pp. 238–44.

³⁴Dian Amelia Sari and Ahmad Fadly Rahman, '2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Maqasid Al- Syar ' Iah 2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin', 2.1 (2024), pp. 119–27.

tanggung jawab spiritual dan moral seorang sebagai khalifah di muka bumi.³⁵ Islam mengajarkan bahwa manusia diberikan amanah untuk menjaga bumi dan seluruh isinya, serta tidak berbuat kerusakan baik secara fisik, sosial. Landasan utama konsep keberlanjutan dalam Islam secara tegas tercermin dalam Surah *Al-Qashash* ayat 77, sebagai berikut:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا
إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ أَحْسَنَ اللَّهُ

*Artinya: Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*³⁶

Potongan ayat ini mengandung pesan penting tentang bagaimana menetapkan hal-hal yang paling penting dalam hidup seseorang. Ayat ini ditunjukkan dalam tafsir Ibnu Katsir betapa pentingnya memanfaatkan semua yang diberikan Allah Ta'ala untuk tujuan yang lebih besar, yaitu kebahagiaan di

³⁵ Muhammad Jali, Nadia Saphir, Fauziyah Mulyana Putr2, Muhammad Miqdad, 'Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi', 1.2 (2025), pp. 1-11.

³⁶ nuonline.

akhirat. Menurut Ibnu Katsir, setiap karunia yang diberikan Allah Ta'ala, termasuk kekayaan dan harta benda, harus digunakan untuk perbuatan yang akan menghasilkan keridhaan Allah dan kebahagiaan di dunia. Hal ini menunjukkan alasan mengapa umat Islam harus memprioritaskan menggunakan segala sumber daya mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki kehidupan mereka di akhirat. Oleh karena itu, ayat ini menyatakan bahwa segala kenikmatan duniawi harus digunakan untuk mencapai tujuan yang lebih mulia.³⁷ Dalam praktiknya, usaha berbasis Islam yang berkelanjutan berarti bahwa setiap proses bisnis mulai dari pemilihan bahan baku, pengelolaan keuangan, pelayanan pelanggan, hingga pengelolaan limbah harus mencerminkan nilai-nilai *syariah*.

D. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis dalam Islam merupakan suatu nilai-nilai moral yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadis, yang menjadi pondasi dasar bagi para pelaku usaha dalam melaksanakan aktivitas bisnis. Etika ini menegaskan bahwa dalam kegiatan bisnis dalam menjalankan suatu usaha atau bisnis tidak hanya memperhatikan omset tetapi juga harus memperhatikan kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan keberkahan dalam setiap transaksi. Dalam pandangan Islam, bisnis dianggap sebagai

³⁷ Hatami. Pendidikan Qur'ani : Kajian Tafsir QS . Al-Qashash Ayat 77 terhadap Nilai dan Prinsip

bentuk dari ibadah jika dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.³⁸

Menurut Djakfar, etika bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis yang harus dijadikan acuan oleh siapa pun dalam aktivitas bisnis agar tercipta keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak. Melalui keempat poin tersebut, para pelaku usaha mempunyai paradigma yang kokoh dalam berbisnis dan dapat bersaing secara sehat serta tidak merugikan pihak lainnya.³⁹

Etika bisnis dalam Islam tujuannya adalah untuk menghasilkan suatu aktivitas ekonomi yang adil, terbuka, dan memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu itu, Islam melarang banyak praktik bisnis yang merugikan seperti bunga, penipuan, kecurangan dalam ukuran, dan praktik monopoli yang merugikan orang lain. Dengan cara menerapkan etika bisnis dengan baik, pelaku usaha diharapkan mampu membangun kepercayaan terhadap konsumen dan menciptakan hubungan bisnis yang panjang.⁴⁰

Adapun prinsip-prinsip syariah menurut Muhammad djakfar:

³⁸ Muhammad Toriq Nurmadiansyah, *Etika Bisnis*.

³⁹R.,Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis Berdasarkan Surahprinsip Etika Bisnis Islam Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis Berdasarkan Surah

⁴⁰Hilmi Ahsan Sutisno And Others, 'Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi Fiqih Muamalah Sebagai Dasar Etika Bisnis Islam', 1.2 (2025), Pp. 37–49.

1. Kejujuran (*Shiddiq*)

Kejujuran adalah dasar yang paling utama atau penting dalam etika bisnis menurut Islam. Para pelaku bisnis diharapkan untuk selalu bersikap jujur dalam setiap transaksi, baik saat menjelaskan kualitas barang, harga, maupun kondisi produk yang ditawarkan. Dengan kejujuran, akan terjalin kepercayaan antara penjual dan pembeli, sehingga hubungan bisnis dapat berjalan dengan lancar.⁴¹

2. Tanggung Jawab (*Amanah*)

Amanah mampu diandalkan dalam melaksanakan tanggung jawab yang diterima. Dalam dunia bisnis, pelaku usaha harus dapat menjaga kepercayaan konsumen dengan menyerahkan produk yang sesuai dengan kesepakatan dan menghindari praktik curang dalam transaksi. Prinsip amanah sangat signifikan dalam membangun citra baik dan keberlangsungan usaha.⁴²

3. Keadilan (*Adl*)

Prinsip keadilan menekankan bahwa pelaku usaha wajib memperlakukan setiap pihak secara adil tanpa diskriminasi atau

⁴¹Mursidah, 'Volume : Etika Bisnis Islam Dalam Hubungan Produsen Dan Konsumen : Kajian Terhadap Prinsip Kejujuran Dan', Pp. 69–84.

⁴²Produsen Dan, Membangun Kepercayaan, and Universitas Muhammadiyah Jakarta, 'Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi', 1.1 (2025), pp. 14–22.

eksploitasi. Dalam pandangan Islam, keadilan merupakan landasan dalam setiap aktivitas ekonomi agar tidak terjadi ketidakadilan ataupun ketimpangan dalam transaksi bisnis.⁴³

4. Tanggung Jawab Sosial

Dalam Islam, tujuan bisnis tidak hanya untuk meraih keuntungan pribadi tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, pelaku usaha diharapkan untuk peduli terhadap kesejahteraan sosial dengan cara membantu masyarakat, menjaga lingkungan, dan memberikan kontribusi yang positif bagi kesejahteraan umum.⁴⁴

E. Konsep Ekonomi Hijau

Konsep ekonomi hijau adalah suatu upaya untuk mengembangkan ekonomi yang memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sambil meminimalkan risiko kerusakan lingkungan dan kekurangan sumber daya alam. Ekonomi hijau mengedepankan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan, sehingga kegiatan ekonomi tidak memberikan efek buruk bagi lingkungan. Di dalam konsep ini, pertumbuhan

⁴³Permana Yoga, 'Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam', 5.2 (2024), Pp. 80–94.

⁴⁴Bunbun Muhamad Burhanudin Dedah Jubaedah, Muhammad Jagat Dermawan, 'Etika Bisnis Perspektif Islam Secara Umum Dan Khusus', 1.1 (2025), Pp. 7–21.

ekonomi harus sejalan dengan perlindungan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya yang efisien.⁴⁵

Menurut *United Nations Environment Programme (UNEP)*, *Towards a Green economy*, dalam buku Islam dan *green economy*, *green economy* adalah “an economy that results in improved human well-being and social equity, while significantly reducing environmental risks and ecological scarcities“. *Green economy* adalah konsep ekonomi yang menekankan efisiensi penggunaan sumber daya, pengurangan limbah, serta perlindungan lingkungan tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi.⁴⁶ Menurut Molly Scot Cato dalam bukunya, Cato menyampaikan pentingnya konsep *green economy* merupakan suatu gagasan ekonomi dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan serta kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi dampak kerusakan lingkungan secara signifikan.⁴⁷

Berdasarkan artikel Implementasi Prinsip Ekonomi Hijau dalam Kebijakan Publik, pendekatan ekonomi hijau adalah

⁴⁵Nazilah Nurhakiki and Nurul Adya Ivanka, “ Implementasi Kebijakan Ekonomi Hijau Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan : Tantangan Dan Peluang ” " *Implementation of Green Economic Policy in Realizing Sustainable Development: Challenges and Opportunities* ", 5.1 (2025), pp. 19–23.

⁴⁶ United Nations Environment Programme (UNEP), *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*, 2011.

⁴⁷ Molly Scott Cato, *How Sustainable Finance Is Shaping the Future of Business*, 2022.

bentuk cara yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus seimbang dengan menjaga kelestarian lingkungan. Dalam penerapannya, beberapa prinsip utama yang bisa diidentifikasi, yaitu rendah karbon, efisiensi pemanfaatan sumber daya, inklusivitas sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, prinsip efisiensi pemanfaatan sumber daya menggarisbawahi pentingnya penggunaan sumber daya alam secara cermat dan optimal supaya tidak ada pemborosan serta tetap tersedia untuk generasi yang akan datang. Selanjutnya, ekonomi hijau juga menjunjung inklusivitas sosial, yang berarti dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara adil, seperti melalui inisiatif perikanan berkelanjutan, perhutanan sosial, dan pengembangan ekonomi yang berlandaskan masyarakat. Prinsip yang terakhir adalah keberlanjutan lingkungan, yang berarti memastikan bahwa setiap kegiatan ekonomi tidak merusak ekosistem, melainkan menjaga kelestarian alam melalui pengelolaan sumber daya yang bijak. Oleh karena itu, ekonomi hijau tidak hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial secara berimbang untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.⁴⁸

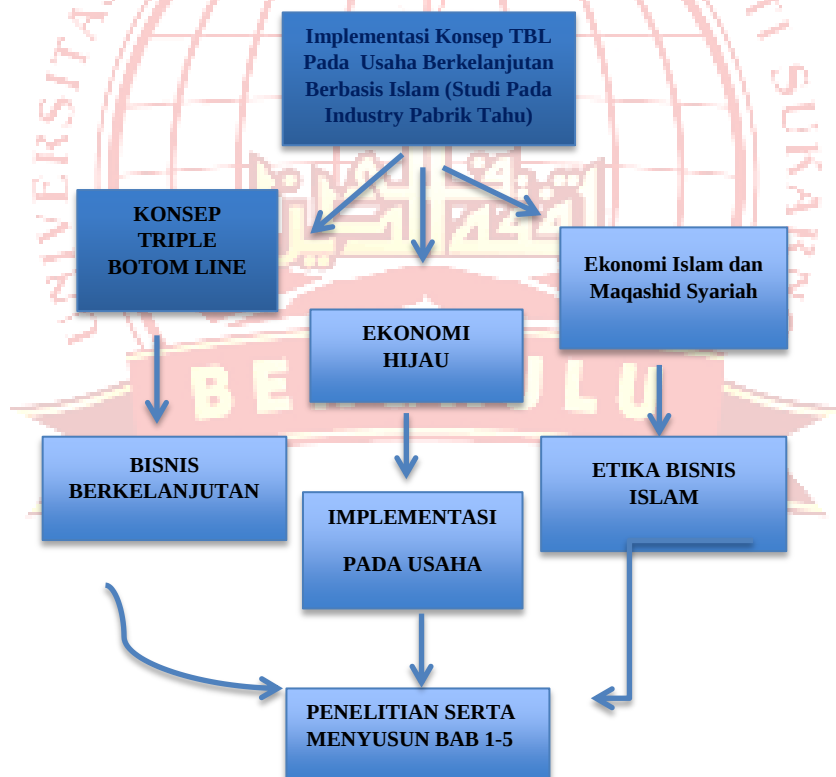
Usaha mikro memiliki peran penting dalam mendukung penerapan ekonomi hijau karena sektor ini merupakan bagian besar dari kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan menerapkan

⁴⁸kinanti Indah Safitr, 'Aktualisasi Prinsip Ekonomi Hijau Dalam Kebijakan Publik: Analisis Kebijakan Riau Hijau', 7 (2025), pp. 676–92.

konsep ekonomi hijau, pelaku usaha mikro dapat menjalankan kegiatan usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga memperhatikan dampak lingkungan.⁴⁹

F.Kerangkah Konseptual

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, peneliti menyusun kerangka konseptual sebagai pijakan dalam menganalisis fenomena yang diteliti. Kerangka konseptual ini berfungsi untuk memberikan arah yang kemudian divisualisasikan dalam bentuk bagan berikut



⁴⁹Agustina Nanda Kartika and others, 'Analisis Implementasi Dalam Mewujudkan Ekonomi Hijau Di Kalimantan Barat', 14.02 (2024).